



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DWI SISRIYENNI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **479283**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.120.000.000**

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 601 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/900 m2 di KAB / KOTA KOTA
PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 721.400.000**

1. MOTOR, SUZUKI SOGUN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
1.400.000
2. MOTOR, HONDA XX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH TRD SPORTIVO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 215.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU GRANMAX BLEN VAN Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX XX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
6. MOBIL, TOYOTA DYNA ENGKEL Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
7. MOBIL, HONDA CITY RS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
270.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.911.321.000
Sub Total	Rp.	5.830.921.000
III. HUTANG	Rp.	3.086.440.279
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.744.480.721

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.